

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan Dalam Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Abdul Hakim G. Nusantara, 1988, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta, YLBHI.
- Bagir Manan, 1987, *Konvensi Ketatanegaraan*, Bandung, Armico.
- Husni Thamrin, 2013, *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.
- Inu Kencana Syafie, 1999, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, PT. Eresco.
- J. Salusu, 1996, *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Profit*, Jakarta, Grasindo.
- Juniarso Ridwan, 2014, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Publik*, Bandung, Nuansa Cendekia.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- M. Nata Saputra, 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali.
- Miriam Budiardjo, 1982, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia.
- Nandang Sudrajat, 2013, *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Philipus M Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika
- Ridwan HR, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press
- Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembinaan*, Jakarta, Grasindo
- Satjipto Raharjo, 1986, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- SF. Marbun, 2005, *Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, UII Press.

WF. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Pradnya Paramita.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

Jurnal:

Andri Yuna Ginting, 2018, "Prosedur Perolehan Izin Tempat Hiburan Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara", *Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara*, Volume 1 Nomor 2, April 2018.

Erikson Sihotang, 2015, "Tindakan Hukum terhadap Pelanggaran Izin Usaha Perdagangan", *Jurnal Hukum Undiknas*, Universitas Mahendradata, Volume 2 Nomor 2, Juli 2015.

Evy Urmilasari, 2013, "Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 6, Nomor 1, Januari 2013.

Faisal Fernandes, 2014, "Persaingan Usaha Terhadap Perizinan Usaha Tempat Hiburan Malam di Kota Samarinda", *Jurnal Beraja Niti*, Volume 3 Nomor 8, Tahun 2014.

Haris Agus Jratama Manik, 2018, "Pelayanan Publik di Bidang Perizinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta", *Jurnal UAJY*, Volume 11 Nomor 1, April 2018.

Ihsanudin, 2014, "Kualitas Pelayanan Publik Pada Badan Perizinan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir", Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka, *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi*, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2014.

Irsa Yonanda, Mochammad Makmur, dan Romula Adiono, 2013, "Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Sektor Industri Pariwisata di Kota Batu", FIA, Universitas Brawijaya Malang, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2013.

Nuria Siswi Enggarani, 2016, “Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali”, *Jurnal Law and Justice*, Universitas Muhammadiyah Surakarta Volume 1 Nomor 1, Oktober 2016.

Suwari Akhmaddhian, 2014, “Reformasi Birokrasi Bidang Perizinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Studi Di Kabupaten Bogor)”, *Jurnal Unpad Sosiohumaniora*, Volume 16 Nomor 2, Tahun 2014.

Trenda Aktiva Oktariyanda, 2013, “Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang Optimal”, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, *Jurnal Kualitas Pelayanan Publik*, Volume 16 Nomor 4, Tahun 2013.

Internet:

Rifia Erna Susianti, 23 November 2017, “*Prosedur Pendirian Perizinan Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum Oleh Kantor Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Boyolali*”, eprints.uns.ac.id, di unduh hari Rabu Tanggal 12 April 2018 Pukul 18:22 WIB

Jimly Asshiddiqie, 22 November 2017, “*Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*”, dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, di unduh hari Senin Tanggal 18 April 2018 Pukul 08:15 WIB

Wiwin Andika, 24 November 2017, “*Pemberian Izin Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum Waterpark Semagi Oleh Dinas Perizinan Daerah Kabupaten Muara Bungo*”, scholar.unand.ac.id, di unduh hari Kamis Tanggal 14 April 2018 Pukul 20:06 WIB